

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Pendekatan Penilitan	7
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Sistematika Penulisan	12

**BAB II KARAKTERISTIK *DISGORGEMENT FUND* DALAM
PEMBERIAN GANTI RUGI INVESTOR DI PASAR
MODAL**

2.1 Pembayaran Ganti Rugi Berbasis Pelanggaran di Pasar Modal	14
--	----

2.2 Pengembalian Kerugian Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran	33
2.2.1 Penerapan Konsep Pemulihan (<i>Remedy</i>) Pada <i>Disgorgement Fund</i> : Teori Keadilan Restoratif dan Keadilan Korektif	33
2.2.2 Penerapan Konsep Hukuman (<i>Penalty</i>) Pada <i>Disgorgement Fund</i> : Pasca Putusan Kokesh v SEC	46
2.2.3 Pengembalian Kerugian Investor Dari Keuntungan Pelaku Pelanggaran	52
2.3 Penegakan <i>Disgorgement Fund</i> Berdasarkan Kewenangan Otoritas Pasar	55

BAB III BENTUK-BENTUK PELANGGARAN YANG DIKENAKAN *DISGORGEMENT FUND*

3.1 Kerugian Dalam Perlindungan <i>Disgorgement Fund</i> : Akibat Pelanggaran	64
3.2 Kerugian Di Luar Perlindungan <i>Disgorgement Fund</i> : Risiko Investasi	94
3.3 Peran Bursa Efek dalam Penerapan <i>Disgorgement Fund</i>	98
3.4 Penerapan <i>Disgorgement Fund</i>	108

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	132
4.2 Saran	133

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Disgorgement dan Disgorgement Fund (RPOJK)

Securities Exchange Act of 1934

Securities Act of 1933

Sorbanes-Oxley of 2002

Statute of Limitation

Securities Enforcement Remedies and Penny Stock 1990